

# IMPLEMENTASI NILAI KEADILAN SOSIAL PANCASILA DALAM MENGATASI KETIDAKADILAN DI MASYARAKAT

Najwa Azzahra<sup>1</sup>, Ario Pamungkas<sup>2</sup>, Indah Halimatun Saadiah<sup>3</sup>, Valensia Rumiris Simangunsong<sup>4</sup>,  
Patricia Agrel Boimas Rahaded<sup>5</sup>

Universitas Esa Unggul

[Indahsaadiah@student.esaunggul.ac.id](mailto:Indahsaadiah@student.esaunggul.ac.id)

## ABSTRACT

*Social justice is one of the main principles of Pancasila that serves as a guideline for creating a just life for all citizens of Indonesia. This principle encompasses the protection of human rights, equality of rights and obligations, common welfare, and equitable distribution of resources. However, various challenges remain, such as economic disparities, discrimination, and unequal access to resources. This research aims to analyze how the values of social justice in Pancasila are implemented to address various forms of injustice in society. To realize social justice, comprehensive efforts are needed, including raising public awareness, designing policies that support the principles of justice, implementing programs that benefit all, and enforcing laws firmly and fairly.*

**Keywords:** Pancasila, social justice, inequality, society.

## ABSTRAK

Keadilan sosial merupakan salah satu prinsip utama dalam Pancasila yang menjadi pedoman dalam menciptakan kehidupan yang adil bagi seluruh warga negara Indonesia. Prinsip ini mencakup perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan hak dan kewajiban, kesejahteraan bersama, serta distribusi sumber daya yang merata. Meski demikian, berbagai tantangan masih dihadapi, seperti kesenjangan ekonomi, diskriminasi, dan ketidakmerataan akses terhadap sumber daya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana nilai keadilan sosial dalam Pancasila diterapkan untuk mengatasi berbagai bentuk ketidakadilan di masyarakat. Untuk mewujudkan keadilan sosial, diperlukan upaya yang menyeluruh, termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat, merancang kebijakan yang mendukung prinsip keadilan, menjalankan program yang merata manfaatnya, serta menegakkan hukum secara tegas dan adil.

**Kata Kunci:** Pancasila, keadilan sosial, ketidakadilan, masyarakat.

## PENDAHULUAN

Pancasila adalah landasan utama bagi negara Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seluruh struktur kehidupan berbangsa menggunakan nilai-nilai Pancasila untuk menjaga keharmonisan, persatuan, dan kesejahteraan bersama. Setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai dan makna yang mendalam. Nilai-nilai tersebut bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memperkokoh persatuan bangsa, menghargai keberagaman budaya, agama, dan etnis,

serta menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai fokus utama. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, masyarakat Indonesia dapat memperkuat moral bangsa, menjaga harmoni, dan mewujudkan tujuan bersama. Prinsip sila kelima Pancasila menyatakan bahwa seluruh warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, dan budaya. Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu berhak untuk hidup layak sesuai dengan martabat manusia dan mendapatkan peluang yang adil. Selain itu, pembangunan harus dilakukan secara adil

dan sesuai dengan kepatutan, yaitu wajar dan proporsional.

Indonesia sebagai negara yang memiliki keragaman budaya, agama, dan suku yang sangat banyak. Hal ini membutuhkan keadilan sosial agar tercipta harmoni dan persatuan di tengah perbedaan. Keadilan sosial tidak hanya tentang pembagian sumber daya yang adil, tetapi juga memastikan semua orang memiliki peluang yang sama, melindungi kelompok yang rentan, dan membangun sistem sosial yang merangkul semua lapisan masyarakat. Untuk mewujudkan keadilan sosial, setiap individu harus bersikap adil terhadap sesama. Semua orang juga berhak hidup dengan menghormati nilai-nilai kemanusiaan, termasuk menuntut hak-hak yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Menurut Notonagoro dalam Rozikin (1995), Pancasila memegang kedudukan penting tidak hanya sebagai landasan ideologis negara, tetapi juga menjadi sumber utama hukum, pedoman hidup masyarakat, serta cerminan jati diri bangsa Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan baik secara fisik maupun mental bagi seluruh masyarakat Indonesia. Namun, di Indonesia, ketidakadilan sosial masih menjadi masalah besar. Ketimpangan ekonomi, kemiskinan, ketidaksetaraan dalam pendidikan, pekerjaan, dan akses yang tidak merata terhadap layanan kesehatan dan infrastruktur adalah contoh nyata ketidakadilan yang perlu segera diatasi. Masalah-masalah ini menghambat kemajuan negara dan bisa menimbulkan ketegangan sosial. Oleh karena itu, mewujudkan keadilan sosial merupakan tanggung jawab bersama seluruh lingkup masyarakat baik pemerintah, masyarakat ataupun lembaga terkait. Untuk mewujudkan keadilan sosial, diperlukan langkah-langkah yang menyeluruh, seperti meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keadilan sosial,

membuat penting untuk kebijakan yang mendukung pemerataan sumber daya, dan menegakkan hukum yang adil serta bebas dari diskriminasi. Selain itu, partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, sangat penting untuk memastikan nilai-nilai keadilan sosial dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembangunan, nilai keadilan sosial mendorong kebijakan yang memprioritaskan kesejahteraan rakyat, seperti membangun infrastruktur di daerah terpencil, meningkatkan layanan publik, dan memberdayakan masyarakat yang kurang mampu. Dengan cara ini, keadilan sosial menjadi dasar penting untuk mencapai cita-cita bangsa.

Nilai keadilan sosial dalam Pancasila juga tidak berdiri sendiri, melainkan saling mendukung dengan sila-sila lainnya, seperti nilai Ketuhanan, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang bijaksana. Dengan mengamalkan nilai-nilai keadilan sosial secara mendalam, Pancasila dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, sejahtera, dan makmur secara menyeluruh. Penelitian ini berfokus pada upaya menganalisis implementasi prinsip-prinsip keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila sebagai solusi untuk mengatasi berbagai bentuk ketidakadilan yang terjadi di masyarakat.

## **LANDASAN TEORI**

Keadilan sosial merupakan salah satu konsep fundamental dalam ilmu sosial yang berfokus pada penyebaran sumber daya, hak, dan kesempatan yang merata di masyarakat. Menurut Akademi Administrasi Publik Nasional, keadilan sosial adalah pengelolaan lembaga-lembaga yang melayani masyarakat secara adil dan setara, baik secara langsung maupun melalui pihak lain. Merencanakan keadilan sosial berarti menyadari bahwa setiap keputusan yang dibuat dapat mempengaruhi berbagai kelompok

masyarakat secara berbeda. Karena itu, sangat penting untuk bekerja sama dengan masyarakat yang terdampak untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan inklusif, sehingga setiap individu dapat hidup dengan layak.

Menurut American Planning Association, keadilan sosial harus didasarkan pada sejarah, kondisi lokal, dan masukan dari berbagai pihak yang terlibat. Mereka juga menekankan pentingnya memperhatikan tiga aspek utama dalam perencanaan keadilan sosial, yaitu:

- Gentrifikasi, yakni perubahan yang dapat merugikan kelompok Masyarakat tertentu.
- Keadilan lingkungan, untuk memastikan keberlanjutan ekosistem yang mendukung kehidupan semua pihak.
- Pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat, agar mereka memiliki suara dalam keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Keadilan sosial mencakup berbagai dimensi, termasuk ekonomi, politik, dan budaya. Dalam konteks masyarakat Indonesia, konsep ini menekankan pembagian kesempatan, hak, dan kewajiban secara merata Tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, etnis, atau gender. Hal ini sejalan dengan sila kelima Pancasila, yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," yang menekankan bahwa keadilan harus diterapkan secara merata tanpa adanya diskriminasi. Keadilan sosial di Indonesia mencakup beberapa prinsip utama, antara lain:

1. Keseimbangan Hak dan Kewajiban. Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan bertanggung jawab atas kewajibannya. Prinsip ini mencakup keseimbangan antara kebutuhan fisik dan spiritual, serta

antara hak sipil dan politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya.

2. Kesetaraan di Hadapan Hukum. Keadilan sosial menuntut agar semua warga negara memiliki kesetaraan derajat di hadapan hukum. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, atau lainnya. Hukum harus berlaku sama untuk semua, memastikan perlindungan yang adil bagi setiap individu.
3. Perlindungan Terhadap Hak Dasar Manusia. Salah satu aspek dari keadilan sosial adalah menjaga dan menghormati hak-hak dasar setiap individu. Ini berarti memberikan perlindungan kepada setiap individu dari tindakan diskriminasi, kekerasan, atau bentuk penindasan yang dapat merugikan mereka.
4. Peningkatan Kesejahteraan Umum. Keadilan sosial berusaha mewujudkan kesetaraan dalam mendapatkan layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, dengan menempatkan kesejahteraan bersama sebagai fokus utama.
5. Proporsionalitas Kepentingan Individu dan Sosial. Dalam rangka menciptakan harmoni sosial, keadilan sosial mengatur proporsionalitas antara kepentingan individu, sosial, dan negara.

Dalam masyarakat yang multikultural seperti Indonesia, keadilan sosial memiliki peran vital untuk menciptakan kesetaraan dan harmoni. Berikut adalah beberapa aspek pentingnya:

- a. Mengatasi Ketimpangan Sosial dan Ekonomi. Ketimpangan yang ada antara wilayah perkotaan dengan pedesaan, serta antara kelompok ekonomi atas dan bawah, menjadi tantangan utama. Program seperti dana desa dan bantuan sosial merupakan langkah konkret dalam mengurangi ketimpangan tersebut.

- b. Penyelenggaraan Kebijakan Publik yang Inklusif. Pemerintah Indonesia menerapkan berbagai program, seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), untuk memastikan akses yang adil terhadap layanan dasar.
- c. Penguatan Solidaritas. Semangat gotong royong yang merupakan bagian integral dari budaya Indonesia, berperan sebagai dasar yang kuat dalam menciptakan keadilan sosial. Solidaritas ini perlu terus dipelihara untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman.
- d. Pencegahan Diskriminasi. Keadilan sosial juga relevan dalam mengatasi isu-isu diskriminasi berbasis suku, agama, ras, dan gender. Penerapan hukum yang adil dan perlakuan setara bagi semua warga negara menjadi langkah penting dalam hal ini.

Secara keseluruhan, keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan dan diskriminasi, serta mewujudkan kesejahteraan sosial melalui pemerataan sumber daya, pembentukan struktur sosial yang adil, dan penerapan prinsip-prinsip keadilan yang mendasari upaya-upaya tersebut. Hal ini menjadi landasan kuat untuk mencapai tujuan bersama dalam membangun bangsa yang berdaulat dan berintegritas. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran nilai keadilan sosial dalam Pancasila sebagai solusi untuk mengatasi ketidakadilan, serta merekomendasikan strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai keadilan sosial yang berkelanjutan.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan, menganalisis, dan

memahami implementasi nilai keadilan sosial dalam mengatasi ketidakadilan di masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber terpercaya, seperti jurnal ilmiah, artikel, laporan lembaga, dan publikasi resmi. Sumber-sumber ini dipilih berdasarkan relevansi dengan topik penelitian dan kontribusinya dalam memberikan wawasan teoritis maupun empiris tentang keadilan sosial.

#### **PEMBAHASAN**

##### **Implementasi Nilai Keadilan Sosial**

Implementasi nilai keadilan sosial berfokus pada distribusi yang merata terhadap sumber daya, hak, dan kewajiban di masyarakat. Prinsip ini tidak hanya berlaku di bidang ekonomi, tetapi juga meluas ke aspek sosial, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi politik. Dalam konteks Indonesia, prinsip keadilan sosial menjadi tanggung jawab negara untuk mewujudkan kesetaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip ini mengharuskan pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua warga negara tanpa diskriminasi, serta memastikan pembagian sumber daya dan kesempatan yang adil di setiap lapisan masyarakat.

Pemerintah dapat mengimplementasikan keadilan sosial dengan melindungi hak pendidikan bagi seluruh rakyat dan memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Program-program seperti bantuan sosial yang terfokus pada kelompok rentan dan terpinggirkan menjadi salah satu cara untuk mendukung individu yang membutuhkan bantuan dan perlindungan. Selain itu, keadilan sosial juga mengamanatkan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang status sosial atau ekonomi, harus diperlakukan sama di hadapan hukum.

Berikut adalah langkah-langkah konkret untuk menerapkan prinsip keadilan sosial di Indonesia:

1) Pendidikan yang Berkeadilan.

Pendidikan harus inklusif, demokratis, dan bebas dari diskriminasi. Setiap warga negara harus memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas. Pendidikan yang adil tidak hanya meningkatkan kemampuan individu, tetapi juga meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Langkah ini penting untuk mengatasi ketimpangan sosial dan diskriminasi.

2) Hukum yang Jelas dan Adil.

Sistem hukum yang tegas dan nondiskriminatif harus diterapkan untuk memastikan keadilan sosial. Semua warga negara harus mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, atau golongan. Penegakan hukum yang adil juga dapat mencegah diskriminasi dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

3) Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pengembangan SDM yang berkualitas merupakan langkah penting untuk menciptakan kesetaraan sosial. Program pelatihan keterampilan dan pendidikan berbasis kebutuhan dapat membantu masyarakat meningkatkan kemampuan mereka. Dengan demikian, mereka dapat berkontribusi secara aktif dalam pembangunan dan mengatasi ketimpangan sosial.

4) Pembangunan yang Berkeadilan.

Pembangunan yang adil harus menjamin bahwa setiap warga negara memperoleh akses yang adil terhadap sumber daya dan fasilitas umum, seperti infrastruktur, air bersih, dan layanan kesehatan. Pemerintah harus memastikan bahwa manfaat pembangunan dirasakan oleh seluruh

masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil.

5) Penerapan Nilai-Nilai Pancasila.

Penerapan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan, demokrasi, dan kesetaraan, seharusnya menjadi landasan dalam setiap aspek kehidupan sosial dan kenegaraan. Nilai-nilai ini dapat membantu menciptakan harmoni sosial, memastikan perlakuan yang adil, dan menghapus diskriminasi di masyarakat.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, Indonesia dapat mewujudkan masyarakat yang lebih setara, inklusif, dan adil. Asas keadilan sosial yang tercermin dalam sila kelima Pancasila merupakan landasan yang sangat penting dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan sejahtera bagi seluruh warga negara Indonesia.

**Peran Pemerintah, Masyarakat Sipil, dan Organisasi Non-Pemerintah dalam Menciptakan Keadilan Sosial yang Lebih Inklusif dan Adil di Indonesia**

Mewujudkan keadilan sosial yang inklusif dan adil di Indonesia memerlukan kolaborasi yang sinergis antara pemerintah, masyarakat sipil, dan organisasi non-pemerintah. Ketiga elemen ini memiliki peran strategis yang saling melengkapi untuk menciptakan kesetaraan, mengatasi diskriminasi, dan memastikan keberlanjutan pembangunan sosial.

1. Peran Pemerintah

Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung keadilan sosial. Kebijakan publik harus inklusif, berbasis data, dan berorientasi pada pengurangan kesenjangan sosial. Contoh nyata peran pemerintah meliputi program jaminan sosial, subsidi pendidikan, layanan kesehatan universal, dan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal. Selain itu, pemerintah harus menjamin penegakan hukum yang adil, non

diskriminatif, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Implementasi kebijakan tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945, memastikan bahwa pembangunan ekonomi dan sosial bersifat inklusif dan berkeadilan.

## 2. Peran Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil, termasuk komunitas lokal dan kelompok masyarakat, berperan sebagai agen perubahan sosial. Mereka dapat mengadvokasi isu-isu keadilan sosial, memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah, serta memobilisasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Selain itu, masyarakat sipil memainkan peran penting dalam mengawasi implementasi kebijakan, memastikan program yang dijalankan benar-benar menjangkau kelompok sasaran. Kolaborasi multi stakeholder antara masyarakat sipil, pemerintah, sektor swasta, dan organisasi lainnya juga penting untuk menciptakan solusi konkret yang dapat mengatasi kemiskinan dan memperkuat inklusi sosial.

## 3. Peran Organisasi Non-Pemerintah

ORNOP memiliki kemampuan menjangkau kelompok rentan, seperti masyarakat kurang terlayani dan penyandang disabilitas, melalui layanan seperti pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan ekonomi. Mereka juga berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah untuk menyuarakan kebutuhan lokal dan mendorong kebijakan yang lebih adil. Dengan kolaborasi antara pemerintah, ORNOP, dan masyarakat, keadilan sosial yang inklusif dan berkelanjutan dapat terwujud. Hal ini mencakup pemerataan peluang, penghormatan hak asasi manusia, dan penghapusan diskriminasi, sehingga semua warga dapat hidup dengan layak dan bermartabat.

**Tantangan dalam Mengatasi Ketidakadilan di Masyarakat**

Mengatasi ketidakadilan dalam masyarakat merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan multidimensional. Beberapa tantangan utama yang diidentifikasi dalam berbagai jurnal ilmiah meliputi:

1. Ketidakadilan dalam Penegakan Hukum: Terdapat disparitas dalam penegakan hukum, di mana masyarakat miskin sering menerima hukuman lebih berat untuk pelanggaran ringan, sementara pelaku kejahatan berat dengan kekuasaan atau kekayaan mendapatkan hukuman lebih ringan. Hal ini mencerminkan ketidakadilan sistem hukum yang perlu diperbaiki.
2. Diskriminasi dan Ketidaksetaraan: Diskriminasi berbasis ras, agama, gender, dan status sosial masih menjadi hambatan signifikan dalam mencapai keadilan sosial.
3. Kesenjangan Sosial-Ekonomi: Perbedaan signifikan antara kelompok masyarakat yang berbeda memperparah ketidakadilan sosial. Upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan ini sangat penting dalam rangka mewujudkan tujuan kesehatan masyarakat yang berkelanjutan dan keadilan sosial.
4. Lemahnya Penegakan Hukum: Penegakan hukum yang tidak konsisten dan adanya perilaku aparat yang tidak profesional menghambat terciptanya keadilan dalam masyarakat. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintah.
5. Ketidakadilan Lingkungan: Pembangunan yang tidak berkelanjutan, terutama di wilayah pesisir, menyebabkan ketidakadilan lingkungan yang berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat setempat.

Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan reformasi sistem hukum, kebijakan yang proaktif dalam mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, serta peningkatan kesadaran dan pendidikan masyarakat mengenai pentingnya keadilan sosial.

## KESIMPULAN

Implementasi nilai keadilan sosial dalam Pancasila adalah fondasi utama untuk mengatasi ketidakadilan di masyarakat Indonesia. Prinsip ini menekankan pemerataan hak, distribusi sumber daya, dan perlindungan terhadap kelompok rentan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Penelitian menunjukkan bahwa program afirmatif seperti bantuan sosial, subsidi pendidikan, dan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal telah memberikan dampak positif. Upaya ini memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar dan membuka peluang bagi kelompok kurang mampu.

Namun, tantangan masih ada, seperti distribusi program yang tidak merata, ketidakselarasan kebijakan antar-pemerintah, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, strategi komprehensif diperlukan, mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penegakan hukum, dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik, Indonesia dapat mencapai tatanan masyarakat yang lebih inklusif, makmur, dan adil.

## DAFTAR PUSTAKA

Nugraha, Aulia, dkk. (2021). Pancasila sebagai Dasar Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Sosial: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 27, No. 1, 64-79.

Oktavia, R. (2020). *Disparitas Penegakan Hukum dalam Masyarakat: Tantangan dan Solusi*. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 15(2), 45-60.

Pasaribu, (2024). Ketidakadilan sosial dalam perspektif sila kelima pancasila.1,47-52.

Pratama, A. (2021). *Diskriminasi Gender dan Dampaknya pada Akses Keadilan Sosial di Indonesia*. *Jurnal Isitiqomah*, 9(1), 85-100.

Rahayu, S. & Permadi, T. (2022). *Kesenjangan Sosial-Ekonomi dan Keadilan dalam Pembangunan*. *Liternote Journal*, 5(3), 29-45.

Rahman, T. (2023). Peran Pancasila dalam Mengatasi Ketidakadilan Sosial di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 15(2), 120-135.

Setiawan, Andi. (2020). Peran Institusi Pemerintah dalam Mewujudkan Keadilan Sosial. *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 8, No. 1, 82-96

Setiawan, D. (2022). Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Berbasis Pancasila. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(1), 45-60

Widjaja, M. (2021). *Pancasila dan Implementasi Kebijakan Publik di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Wijaya, A. (2021). *Ketidakadilan Lingkungan dalam Pembangunan Pesisir di Indonesia*. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 12(2), 98-115.